

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. Terbentuknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

PDI Perjuangan merupakan salah satu dari tiga partai besar yang mewarnai kancah dunia politik di Indonesia. PDI Perjuangan merupakan kepanjangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan partai politik yang memiliki sejarah panjang dengan basis massa yang kuat. PDI Perjuangan sebetulnya adalah partai yang memiliki pertalian erat dengan partai politik yang berdiri di masa Orde Baru. Diawali pada masa pemerintahan Orde Baru dimana keadaan perpolitikan tidak mencerminkan semangat demokrasi dikarenakan pemerintahan yang otoriter. PDI Perjuangan sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berdiri tanggal 10 Januari 1973. PDI sendiri merupakan hasil fusi dari 5 partai yaitu :

a. Partai Nasional Indonesia (PNI)

PNI didirikan Bung Karno tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Dengan mengusung nilai-nilai dan semangat nasionalisme, PNI kemudian berkembang pesat dalam waktu singkat. Karena dianggap berbahaya oleh penguasa kolonial, tanggal 29 Desember 1929 semua kantor dan rumah pimpinan PNI digeledah. Bung Karno, Maskun, Supriadinata dan Gatot Mangkupraja ditangkap. Berdasarkan keputusan yang ditetapkan Raad van Justitie tanggal 17 April 1931,

mereka di pidana penjara. Keputusan ini diartikan mencap PNI sebagai suatu organisasi yang terlarang.

Setelah tanggal 3 November 1945 keluar Maklumat Pemerintah tentang pembentukan Partai Politik. Dengan landasan tersebut, tanggal 29 Januari 1946 di Kediri PNI dibentuk yang merupakan fusi dari partai Serikat Rakyat Indonesia atau di kenal dengan Serrindo pada waktu itu, PNI Pati, PNI Madiun, PNI Palembang, PNI Sulawesi, kemudian Partai Republik Indonesia Madiun, Partai Kedaulatan Rakyat Yogya, dan ada beberapa lagi partai kecil lainnya yang berada di Kediri, serta beberapa partai lokal kecil lainnya. Fusi dilakukan ketika diselenggarakannya Kongres Serindo I di Kediri, 29 Januari s/d 1 Pebruari 1946. Dalam Kongres tersebut PNI dinyatakan memiliki ciri Sosio-Nasionalisme Demokrasi yang merupakan asas, ideologi dan cara perjuangan yang dicetuskan Bung Karno untuk menghapuskan kapitalisme, imperialism dan kolonialisme. Penggunaan azas ini mencerminkan keinginan para pendirinya untuk mengasosiasikan diri dengan Bung Karno sebagai pendiri PNI di masa lalu (<http://www.pdiperjuangan.or.id/sejarahpartai>).

Jadi dapat dijelaskan bahwa ideologi partai ini menggunakan apa yang dikembangkan oleh Bung Karno yaitu Marhaenisme, sebuah istilah yang di bangun atau dipakai oleh beliau ketika beliau melakukan kunjungan ke salah satu daerah di Jawa Barat dan bertemu dengan seorang petani yang namanya Marhaen. PNI merupakan partai pemenang pemilu nomor satu dalam pemilu tahun 1955 dengan komposisi suara kurang lebih 22,3%. Basis sosial dari partai ini pertama-tama adalah masyarakat abangan di Jawa. Kekuatan mobilisasi terletak pada

penguasaan atas birokrasi dan yang kedua adalah para pamong praja, lurah dan para kepala desa.

b. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)

Parkindo adalah partai kedua terbesar dalam PDI menurut hasil Pemilu 1955. Partai ini didirikan pada 18 November 1945 sebagai respons atas Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Partai ini merupakan fusi dari sejumlah partai Kristen lokal seperti Partai Kristen Indonesia (Parki) di Sumut, Partai Kristen Nasional di Jakarta, Persatuan Masehi Indonesia (PMI), Partai Politik Masehi (PPM) di Pematang Siantar (<http://www.pdiperjuangan.or.id/sejarahpartai>).

Jadi dapat dijelaskan bahwa partai ini mendasarkan legitimasi dan identitasnya pada agama, yakni Kristen yang merupakan kelompok minoritas permanen dalam konstelasi politik nasional. Paham kekristenan dijadikan sebagai azas partai. Basis dukungan partai ini menyebar di berbagai daerah di Indonesia, seperti Sumatera Utara, Timor, Minahasa, Toraja, dan sebagainya. Sebagai partai pemenang pemilu kedua terbesar yang bergabung dalam PDI, partai ini diberi hak atas posisi Sekjen dalam struktur PDI.

c. Partai Katolik Republik Indonesia

Partai Katolik lahir kembali pada 12 Desember 1945 dengan Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) dan merupakan kelanjutan dari Perkumpulan Politik Katolik Djawi (PPKD). Pada masa belanda, PPKD, karena kebutuhan siasat politik bergabung dengan Indische Katholieke Partij. Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan azas kekatolikan ditempatkan sebagai azas partai. Sementara

“kemajuan Republik Indonesia dan kesejahteraan rakyat” ditempatkan sebagai tujuan partai (<http://www.pdiperjuangan.or.id/sejarahpartai>).

Jadi dapat dijelaskan bahwa dukungan sosial partai ini adalah umat Katolik yang menyebar di sejumlah daerah. Partai ini adalah pemenang ketiga terbesar Pemilu 1955 yang berfusi dalam tubuh PDI. Karenanya konsensus dalam proses fusi memberikan “hak” atas jabatan Bendahara bagi parpol ini.

d. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)

IPKI dibentuk oleh tokoh-tokoh yang umumnya berasal dari lingkungan TNI. Awalnya partai ini merupakan “kumpulan pemilih” yang berinisiatif untuk menghimpun tenaga-tenaga pejuang kemerdekaan, terutama dari lingkungan TNI AD untuk memelopori perjuangan rakyat setelah revolusi fisik. IPKI sejak lahirnya mencanangkan Pancasila, semangat proklamasi dan UUD 1945 sebagai cirinya. Tokoh dibalik pendirian IPKI adalah AH Nasution, Kol Gatot Subroto dan Kol Azis Saleh. Kelahirannya didasari oleh UU No. 7 tahun 1953 tentang Pemilu 1955 Dalam pemilu itu anggota ABRI aktif dapat dipilih melalui pemilu dan duduk di Konstituante.

IPKI didirikan pada 20 Mei 1954, satu setengah tahun sebelum Pemilu 1955 dan dimotori oleh Nasution yang pada waktu itu berada dalam status “hukuman” oleh Bung Karno sebagai akibat dari “Peristiwa Oktober 52”. Sebuah peristiwa dimana TNI mencoba untuk memaksa Bung Karno dengan mengarahkan meriam ke istana Negara untuk membubarkan parlemen yang dinilai Nasution dan kawan-kawan mencampuri urusan TNI. Dalam dokumen partai disebutkan bahwa IPKI

menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan dan pemimpinya, dan menempatkan diri sebagai “penyambung lidah golongan berkuasa” dan sekaligus “pengabdikan rakyat yang jujur dan setia”. (<http://www.pdiperjuangan.or.id/sejarahpartai>).

Jadi dapat dijelaskan bahwa tujuan partai ini adalah mengakhiri dan melenyapkan seluruh penderitaan rakyat, lahir dan batin. Juga memberikan hikmah rohaniyah dan jasmaniah kepada seluruh rakyat dengan menjamin keselamatan, ketentraman dan kemakmuran.

e. Murba

Murba didirikan pada tanggal 7 November 1948 setelah Tan Malaka keluar dari penjara Murba adalah gabungan dari partai Rakyat Jelata dan Partai Indonesia Buruh Merdeka. Murba sebagai sebuah istilah mengacupada “golongan rakyat yang terbesar, tidak mempunyai apa-apa, kecuali otak dan tenaga sendiri”. Istilah ini kurang lebih sama dengan istilah proletar, akan tetapi seperti ditegaskan dalam dokumen Kementerian Penerangan memiliki sejarah hidup, corak dan musuh yang berbeda dengan proletar. Murba sebagai ideologi berbeda dengan Marhaenisme Bung Karno karena adanya pengakuan Bung Karno atas kepemilikan alat-alat produksi oleh kaum marhaen, sekalipun dalam skala yang sangat kecil dan subsisten. Azas Murba adalah anti fasisme, sebuah paham yang dikembangkan oleh Jepang dan Italia sebelum perang Dunia II, anti imperialisme dan kapitalisme.

Tujuan partai ini adalah masyarakat sosialis. Dari sudut basis sosial, pendukung Murba sulit diidentifikasi. Murba hanya mendapatkan sedikit dukungan di Jabar dalam Pemilu 1955 dan tidak mendapatkan satu pun kursi. Fusi lima parpol berlangsung pada 10 Januari 1973 yang kini dirayakan sebagai hari ultah PDI Perjuangan. Beberapa fenomena penting sebelum fusi dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Proses ke arah fusi merupakan inisiatif presiden yang diwujudkan dalam bentuk rangkaian konsultasi antara presiden dengan tokoh-tokoh parpol. Konsultasi pertama dilakukan secara kolektif dengan tokoh-tokoh dari 9 parpol pada 7 Januari 1970. Dalam kesempatan ini Presiden melontarkan gagasan pengelompokan parpol ke dalam dua kelompok, masing-masing menekankan pada aspek materiil dan spirituil. Dengannya, akan terbentuk dua kelompok, materiil-spirituil dan spirituil-materiil. Dalam pertemuan ini juga terungkap bahwa ide tersebut berkaitan dengan keinginan Presiden untuk menciptakan stabilitas yang disebutkan sebagai “tanggung-jawab bersama”, terutama untuk meredam konflik menjelang pemilu 1971. Dalam Pemilu 1971 partai ini tidak memperoleh satu pun kursi di DPR karena hanya mampu meraih 48.126 suara (0,09 %).

Kelima partai ini akhirnya sepakat untuk melakukan fusi dengan nama Partai Demokrasi Indonesia pada 10 Januari 1973. Deklarasi ditandatangani oleh wakil kelima partai yaitu MH. Isnaeni dan Abdul Madjid mewakili Partai Nasional Indonesia, A. Wenas dan Sabam Sirait mewakili Partai Kristen Indonesia, Beng Mang Rey Say dan FX. Wignyosumarsono mewakili Partai Katolik, S. Murbantoko R. J. Pakan mewakili Partai Murba dan Achmad Sukarmadidjaja dan

Drs. Mh. Sadri mewakili Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Pada tanggal 13 Januari 1973 Majelis Pimpinan Partai (MPP) terbentuk, Sabtu 14 Januari 1973 jam 01.20 pagi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) berhasil menyusun struktur dan personalia Dewan Pimpinan Pusat sampai terselenggaranya Kongres Nasional. Susunan kepengurusan DPP PDI sebagai berikut :

- MAJELIS PIMPINAN PUSAT (beranggotakan 25 orang)
- DEWAN PIMPINAN PUSAT (beranggotakan 11 orang)

Sebuah partai fusi, seperti PDI tidak akan pernah lepas dengan konflik didalamnya. Perbedaan ideologis hingga latar belakang adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik tersebut. Belum lagi adanya rivalitas antar elit dalam internal parpol serta tekanan yang diberikan pemerintah Orde Baru dalam menyempitkan ruang gerak parpol (<http://www.pdiperjuangan.or.id/sejarahpartai>).

Jadi dapat dijelaskan bahwa dalam perkembangannya PDI terbentuk dalam 3 periode yaitu dari tahun 1973 hingga 1986. Periode pertama, 10 Januari 1973 hingga 13 April 1976 merupakan periode pemantapan fusi atau unifikasi. Periode kedua, dari tahun 1976 hingga 1981, dikenal sebagai masa krisis bagi internal partai. Hal ini dilihat dari konflik dan perseteruan yang terus terjadi dalam tubuh PDI. Ini juga dijadikan kesempatan bagi pemerintah Orde Baru untuk ikut mengintervensi permasalahan internal PDI. Salah satunya adalah terkait masalah DPP ganda partai dimana pemerintah ikut masuk untuk menyelesaikan masalah yang dikenal dengan sebutan “Penyelesaian Politis 16 Januari”. Selain itu masih

banyak lagi cara yang dilakukan oleh Orde Baru untuk “menundukkan” PDI. Semua itu dilakukan pemerintah agar PDI menjadi partai pendukung Orde Baru.

Dan periode terakhir, dari 1981 hingga 1986, dikenal sebagai masa reunifikasi. Melalui periode ketiga inilah, PDI memulai untuk kembali menyatukan unsur-unsur partai yang selama ini berkonflik sekaligus mulai memantapkan Pancasila sebagai ideologi partai. Oleh karena itu persatuan internal partai menjadi fokus penting PDI ketimbang bersikap keras pada pemerintah.

2. PDIP dibawah Megawati Soekarno Putri

Terjunnya sosok Megawati dalam perpolitikan dimulai pada tahun 1986 ketika ia mengetuai PDI cabang Jakarta Pusat. Megawati Soekarnoputri dianggap mampu menjadi tokoh pemersatu PDI. Dukungan tersebut muncul dari DPC berbagai daerah yang datang kekediamannya pada tanggal 11 September 1993 sebanyak lebih dari 100 orang yang berasal dari 70 DPC. Mereka meminta Megawati tampil menjadi kandidat Ketua Umum DPP PDI melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar pada tanggal 1-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Hal ini tentu saja menjadi ancaman bagi pemerintah Orde Baru.

Pemerintah tidak ingin Megawati tampil dan untuk menghadang laju Megawati ke dalam bursa pencalonan Ketua Umum, dalam acara Rapimda PDI Sumatera Utara tanggal 19 Oktober 1993 yang diadakan dalam rangka persiapan KLB muncul larangan mendukung pencalonan Megawati. Kendati penghadangan oleh Pemerintah terhadap Megawati untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua

Umum sangat kuat, keinginan sebagian besar peserta KLB untuk menjadikan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI tidak dapat dihalangi hingga akhirnya Megawati dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 secara de facto. Akhirnya Musyawarah Nasional (Munas) dilaksanakan tanggal 22-23 Desember 1993 di Jakarta dan secara de jure Megawati Soekarno putri dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP PDI. Dalam Munas ini dihasilkan kepengurusan DPP PDI periode 1993-1998.

Berakhirnya Munas ternyata tidak mengakhiri konflik internal PDI. Kelompok Yusuf Merukh membentuk DPP PDI Reshuffle walau tidak diakui oleh Pemerintah namun kegiatannya tidak pernah dilarang. Adalah Soerjadi, tokoh PDI yang dulunya pernah dibuang oleh Orde Baru kini dimunculkan kembali untuk menjadi pesaing bagi kedudukan Megawati. Disamping itu kelompok Soerjadi sangat gencar melakukan penggalangan ke daerah-daerah dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan menggelar Kongres. Dari 28 pengurus DPP PDI, 16 orang anggota DPP PDI berhasil dirangkulnya untuk menggelar Kongres.

Ketua Umum DPP PDI, Megawati Soekarno putri menolak tegas diselenggarakannya "Kongres", kemudian pada tanggal 5 Juni 1996, empat orang deklarator fusi PDI yakni Mh Isnaeni, Sabam Sirait, Abdul Madjid dan Beng Mang Reng Say mengadakan jumpa pres menolak Kongres. Kelompok Fatimah Achmad yang didukung oleh Pemerintah tetap menyelenggarakan Kongres pada tanggal 2-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan dengan didukung penjagaan yang sangat ketat dari aparat keamanan lengkap dengan panser. Pagar Asrama Haji tempat kegiatan berlangsung ditinggikan dengan kawat berduri setinggi dua

meter. Disamping itu di persimpangan jalan dilakukan pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk terhadap orang-orang yang melintas. Warga PDI yang tetap setia mendukung Megawati demonstrasi secara besar-besaran pada tanggal 20 Juni 1996 memprotes Kongres rekayasa yang diselenggarakan oleh kelompok Fatimah Achmad, demonstrasi itu berakhir bentrok dengan aparat dan saat ini dikenal dengan "Peristiwa Gambir Berdarah".

Meskipun masa pendukung Megawati yang menolak keras Kongres Medan, namun Pemerintah tetap mengakui hasil Kongres tersebut, melalui Kongres Luar Biasa PDI di Medan, Soerjadi terpilih menjadi Ketua Umum PDI. Pemerintah mengakui secara formal keberadaan DPP PDI hasil Kongres Medan dan menyatakan PDI hasil Kongres Medan sebagai peserta Pemilu tahun 1997. Tanggal 25 Juli 1996 Presiden Soeharto menerima 11 pengurus DPP PDI hasil Kongres Medan yang dipimpin oleh Soerjadi selaku Ketua Umum dan Buttu Hutapea selaku Sekretaris Jenderal. Hal ini semakin membuat posisi Megawati dan para pengikutnya semakin terpojok.

Masa pendukung Megawati mengadakan "Mimbar Demokrasi" di halaman Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro hingga pada tanggal 27 Juli 1996, kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkaos merah yang bermaksud mengambil alih kantor DPP PDI. Di sisi lain, Soerjadi yang dilindungi pemerintah Orde Baru terus mengancam pihak Mega untuk segera meninggalkan kantor tersebut. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Peristiwa "Sabtu Kelabu 27 Juli" yang banyak menelan korban jiwa. Pada saat itu massa pendukung Soerjadi bergerak menyerang massa pendukung Mega yang bertahan di kantor DPP yang terletak di

Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat. Dari peristiwa ini banyak korban jiwa dan harta benda yang berjatuh. Terlebih lagi, peristiwa ini sendiri akhirnya terus meluas ke daerah-daerah lain.

Pasca peristiwa 27 Juli, Megawati beserta jajaran pengurusnya masih tetap eksis walaupun dengan berpindah-pindah kantor dan aktivitas yang dilakukan dibawah pantauan Pemerintah. Pada Pemilu 1997 Megawati melalui Pesan Hariannya menyatakan bahwa PDI dibawah pimpinannya tidak ikut kampanye atas nama PDI. Pemilu 1997 diikuti oleh PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan hasil Pemilu menunjukkan kuatnya dukungan warga PDI kepada Megawati karena hasil Pemilu PDI merosot tajam dan hanya berhasil meraih 11 kursi DPR.

Tahun 1998 membawa angin segar bagi PDI dibawah kepemimpinan Megawati. Di tengah besarnya keinginan masyarakat untuk melakukan reformasi politik, PDI dibawah kepemimpinan Megawati kian berkibar. Pasca Lengsernya Soeharto, dukungan terhadap PDI dibawah kepemimpinan Megawati semakin kuat, sorotan kepada PDI bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Pada tanggal 8-10 Oktober 1998, PDI dibawah kepemimpinan Megawati menyelenggarakan Kongres V PDI yang berlangsung di Denpasar Bali. Kongres ini berlangsung secara demokratis dan dihadiri oleh para duta besar Negara sahabat. Kongres ini disebut dengan "Kongres Rakyat". Karena selama kegiatan Kongres berlangsung dari mulai acara pembukaan yang diselenggarakan dilapangan Kapten Japa, Denpasar sampai acara penutupan Kongres, jalan-jalan selalu ramai dipadati warga masyarakat yang antusias mengikuti jalannya Kongres tersebut.

Di dalam Kongres V PDI, Megawati Soekarno Putri terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003 secara aklamasi. Di dalam Kongres tersebut, Megawati diberi kewenangan khusus untuk mengambil langkah-langkah organisatoris dalam rangka eksistensi partai, NKRI dan UUD 1945, kewenangan tersebut dimasukkan di dalam AD-ART PDI. Meskipun pemerintahan sudah berganti, namun yang diakui oleh Pemerintah adalah masih tetap PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea. Oleh karenanya agar dapat mengikuti Pemilu tahun 1999, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999 yang disahkan oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal, kemudian dideklarasikan pada tanggal 14 Februari 1999 di Istana Senayan Jakarta.

Pemilu tahun 1999 membawa berkah bagi PDI Perjuangan, dukungan yang begitu besarnya dari masyarakat menjadikan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu dan berhasil menempatkan wakilnya di DPR sebanyak 153orang. Dalam perjalanannya kemudian, Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi KH Abdurahman Wahid yang terpilih didalam Sidang Paripurna MPR sebagai Presiden Republik Indonesia Ke-4. Untuk pertama kalinya setelah berganti nama dari PDI menjadi PDI Perjuangan, pengurus DPP PDI Perjuangan memutuskan melaksanakan Kongres I PDI Perjuangan meskipun masa bakti kepengurusan DPP sebelumnya baru selesai tahun 2003. Salah satu alasan diselenggarakannya Kongres ini adalah untuk memantapkan konsolidasi organisasi Pasca terpilihnya Megawati sebagai Wakil Presiden RI.

Kongres I PDI Perjuangan diselenggarakan pada tanggal 27 Maret-1April 2000 di Hotel Patra Jasa Semarang-Jawa Tengah. Menjelang Kongres I PDI Perjuangan, sudah muncul calon-calon kandidat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, nama yang muncul antara lain Dimiyati Hartono yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, kemudian muncul pula nama Eros Jarot yang sempat menggalang DPC-DPC untuk mendukungnya. Di dalam pemandangan umum Cabang-Cabang, dari 243 DPC, hanya 2 DPC yang mengusulkan nama lain yaitu DPC KotaJayapura dalam pemandangan umumnya mengusulkan 3 orang calon Ketua Umum yaitu Megawati, Dimiyati Hartono dan Eros Jarot, kemudian DPC Kota Banjarmasin mengusulkan Eros Jarot sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.

Kongres I PDI Perjuangan akhirnya menetapkan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2000-2005 secara aklamasi tanpa pemilihan karena 241 dari 243 DPC mengusulkan nama Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Setelah Kongres I PDI Perjuangan tahun 2000, pada tahun 2001 Megawati diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Ke-5 menggantikan KH Abdurahman Wahid yang diturunkan dalam Sidang Istimewa MPR-RI. Diangkatnya Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI ke-5 membawa perubahan pada sikap politik PDI Perjuangan dan cap sebagai partai penguasa melekat di PDI Perjuangan. Meski sebagai partai penguasa, PDI Perjuangan ternyata tidak mampu meraih kemenangan di dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2004. PDI Perjuangan hanya mampu memperoleh suara di urutan kedua dengan 109 kursi di DPR.

Kongres II PDI Perjuangan diselenggarakan pada tanggal 28 - 31 Maret 2005 di Hotel Grand Bali Beach. Kongres II PDI Perjuangan akhirnya berakhir pada tanggal 31 Maret 2005 setelah Megawati dikukuhkan sebagai Ketua Umum terpilih karena seluruh peserta dalam pemandangan umumnya mengusulkan Megawati menjadi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2005-2010. Pada tanggal 25 April 2005, kepengurusan DPP PDI Perjuangan hasil Kongres II PDI Perjuangan dilaporkan ke Departemen Kehakiman dan HAM dan pada tanggal 30 Mei 2005 Menteri Hukum dan HAM menerbitkan surat keputusan nomor: M-01.UM.06.08 Tahun 2005 yang menerima perubahan kepengurusan dan AD-ART hasil Kongres tersebut (<http://www.pdiperjuangan.or.id/sejarahpartai>).

Maka dapat disimpulkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebetulnya adalah partai yang memiliki pertalian erat dengan partai politik yang berdiri di masa Orde Baru. Partai ini merupakan lanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang di bentuk 10 Januari 1973.

1. Terbentuknya PDI Perjuangan Cabang Kabupaten Klaten

Terbentuknya PDI di Kabupaten Klaten tidak dapat terlepas dari proses terbentuk dan berkembangnya di tingkat pusat maupun di daerah. Pembentukan DPP, DPD dan DPC PDI pada dasarnya merupakan tuntutan mekanisme kehidupan partai yang harus berlangsung dan berjalan di tingkat daerah maupun cabang dan dengan demikian merupakan perwujudan dari tahap konsolidasi yang berhasil dicapai oleh pusat di tingkat daerah maupun cabang.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan salah satu wahana pengorganisasian rakyat, yang lahir, tumbuh dan berkembang sebagai upaya bersama rakyat untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut. Keberadaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berawal dari kelompok demokrasi pembangunan, pada tanggal 9 Maret 1970, oleh lima partai politik yaitu PNI, IPKI Partai Katolik, PARKINDO, dan Partai Murba, yang kemudian dikukuhkan dengan pernyataan bersama pada tanggal 28 Oktober 1971. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 10 Januari 1973, kelima partai politik tersebut melakukan langkah strategis dengan memfusikan diri menjadi satu wadah perjuangan politik rakyat, yang berasaskan Pancasila, dengan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada penutupan kongres Ke 2 PDI di Jakarta tanggal 17 Januari 1981 kelima partai yang berfusi tersebut menegaskan bahwa perwujudan fusi telah paripurna, serta menyatakan perakhiran eksistensi masing-masing. Hal ini di pertegas lagi dalam keputusan-keputusan kongres ke-5 PDI di Denpasar Bali, tanggal 8-10 Oktober 1998.

Guna memenuhi tuntutan undang-undang yang berlaku, maka pada tanggal 1 Februari 1999 dibentuklah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, disingkat PDI Perjuangan dalam bentuk badan hukum, yang merupakan kelanjutan tak terpisahkan dari PDI yang didirikan pada tanggal 10 Januari 1973. PDI Perjuangan dengan asas Pancasila dan bercirikan kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial yang bertekad untuk :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan cita-citanya, maka pada kongres I PDI Perjuangan di Semarang 27 Maret-1 April 2000, menetapkan, mensahkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seperti halnya proses fusi PDI di pusat, PDI di Kabupaten Klaten dilakukan secara bertahap. Mengingat bahwa kelima partai yang akan bergabung memiliki latar belakang ideologi, sejarah, dan basis massa yang berbeda sehingga tidak begitu mudah untuk berfusi menjadi satu wadah kegiatan politik dengan nama PDI.

Kehadiran Orde Baru telah mengubah kehidupan partai politik di Indonesia. Semangat pemerintah Orde Baru terhadap kehidupan partai adalah mengadakan pembaharuan struktur politik yang dimulai dengan menyederhankan sistem kepartaian yang ada setelah maklumat 3 November 1945. Seperti saran pemerintah tentang pengelompokan partai. Di Kabupaten Klaten juga terdapat pengelompokan partai yaitu kelompok spiritual, kelompok Nasionalis, dan Golongan Karya. Kelompok Nasionalis di Kabupaten Klaten merupakan gabungan lima partai politik. Kelima partai tersebut adalah PNI, IPKI, Partai Murba, PARKINDO, dan Partai Katolik.

Kelompok Nasionalis itu telah dirintis sejak tahun 1969 dan pada tahun 1972 kelompok Nasionalis bernama kelompok Demokrasi Pembangunan (KDP). Kalo

dilihat pengelompokannya sebenarnya Partai Katolik dan PARKINDO seharusnya masuk kedalam kelompok spiritual, tetapi kedua partai tersebut masuk ke dalam kelompok nasionalis. Menurut Bapak Kris (Dalam Skripsi Lambertus Dodik Prasetyo, 2015:44) ketua DPC PDI Kabupaten Klaten 2006-2009, Partai Katolik dan PARKINDO masuk kedalam kelompok nasionalis karena berdasarkan himbuan dari masing-masing induk partai yang berada di pusat. Selain itu juga PARKINDO dan Partai Katolik merupakan partai yang cenderung menonjolkan aspek nasionalisme atau rasa kebangsaan dari pada aspek agama. Jadi secara psikologis sulit bersatu dengan kelompok spiritual karena pada dasarnya kelompok spiritual lebih menekankan aspek spiritual tanpa mengabaikan aspek material.

Setelah KDP terbentuk, tugas KDP selanjutnya adalah mempersiapkan terbentuknya suatu wadah yang lebih mapan, yang merupakan berfungsinya kelima partai politik. Terbentuknya KDP juga mengandung pengertian bahwa pengertian fusi semakin diperjelas, yakni partai-partai yang bergabung didalamnya sudah tidak berdiri sendiri-sendiri dan segala kegiatan politiknya dialihkan ke dalam partai baru tersebut. Seperti halnya di pusat, partai-partai yang beragabung dalam kelompok KDP mengalami penurunan drastis dalam perolehan suara pada pemilihan umum tahun 1971. Demikian juga di Kabupaten Klaten, dalam pemilihan tahun 1971 PNI mendapat 8 kursi dan Partai Katolik mendapat 1 kursi di DPRD II, sedangkan IPKI, Partai Murba, dan PARKINDO tidak mendapat kursi di DPRD II. Maka dalam keadaan yang tidak menguntungkan dari hasil pemilu 1971, PNI sebagai partai yang terbesar pertama

kali mengambil inisiatif untuk segera melakukan fusi bagi kelima partai yang bergabung dalam KDP seperti yang dihimbau dari pusat. Demikian juga partai yang lain tidak ada pilihan untuk memfusikan diri.

Sebagai langkah awal, setelah masing-masing partai mendapat surat himbuan dari partai induknya maka mereka mengirimkan wakil-wakil untuk mengadakan musyawarah bagi terbentuknya PDI. Musyawarah tersebut bertempat di kantor DPC PNI di Kabupaten Klaten Jalan Irian no. 8 Klaten. Setelah wakil kelima partai tersebut berkumpul dan mengadakan musyawarah, mereka mempunyai kesepakatan yang sama untuk memfusikan diri dalam satu wadah kegiatan politik dengan nama Partai Demokrasi Indonesia. Dalam kesepakatan tersebut tidak ada halangan yang berarti sebab wakil-wakil dari masing-masing kelima partai mempunyai kesadaran yang tinggi agar segala aspirasi rakyat tidak tersalurkan dalam banyak partai sehingga menimbulkan perpecahan. Selain itu juga dukungan dari pemerintah sebab dengan banyak partai dipandang menjadi penyebab ketidakstabilan pemerintahan. Setelah kesepakatan untuk memfusikan kelima partai tercapai, maka pemfusian tersebut secara resmi dituangkan dalam deklarasi pembentukan Partai Demokrasi Indonesia bulan Desember 1973, yang akan diumumkan tanggal 10 Januari 1974. Piagam tersebut ditandatangani masing-masing kelima partai yaitu Tulus Wigniyono Martono dan Sukirno Hadi dari PNI, Istowo Anindito dari IPKI, S. Wigniyono Subroto dan Suharto dari PARKINDO, Neo Suradi dan H Rochim dari Partai Katolik, serta Suyoko dari Partai Murba.

Setelah terwujudnya kesepakatan bersama sehingga menghasilkan PDI, maka langkah selanjutnya adalah membentuk kepengurusan PDI. Sama seperti daerah-

daerah yang lain, dalam kepengurusan ini timbul perselisihan antar sesama musyawarah tidak menimbulkan masalah yang berarti. Masalah yang timbul adalah perbedaan pendapat masalah personalia yang akan didudukkan dalam kepengurusan partai politik yang baru tersebut, namun masalah tersebut dapat dipecahkan dengan cara kesepakatan bersama. Di tingkat DPC komposisi kepengurusan disusun berdasarkan perkiraan besarnya massa pendukung masing-masing unsur, yang dapat dilihat melalui hasil pemilihan umum. PDI Kabupaten Klaten sebagian besar dipegang oleh orang PNI. Hal ini dapat diterima partai lain, sebab mereka menyadari bahwa PNI merupakan partai besar sehingga lebih banyak dapat menentukan suara dalam rapat. Akhirnya mereka dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan terbentuknya kepengurusan sebagai berikut :

- Ketua : Tulus Wignyo Wartono
- Wakil Ketua : Jalil Padjo Suharso
Sambodo wignjo Subroto
Istowo Anindito
Suyoko
- Sekretaris : Sukirno Hadi
- Wakil Sekretaris : H. Rochim
Ir. Mulyono
- Bendahara : Jumadi Siswomartono
- Wakil Bendahara : Sumarjo Siswohartono

Dengan disepakati keputusan mengenai pertimbangan komposisi dalam DPC PDI Kabupaten Klaten oleh partai-partai yang bergabung didalamnya maka tindak

lanjutnya adalah mengusulkan struktur organisasi yang sudah terbentuk ke DPP PDI dengan rekomendasi dari DPD PDI Jawa Tengah. Akhirnya pada tahun 1974 pemerintah daerah Kabupaten Klaten mengeluarkan surat keputusan pembentukan DPC PDI Kabupaten Klaten (Dalam Skripsi Lambertus Dodik Prasetyo, 2015:41-47).

Maka dapat disimpulkan bahwa terbentuknya partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara resmi di Kabupaten Klaten yaitu pada tahun 1974.

B. Profil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. Lokasi DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten

Lokasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten terletak di Jalan Ronggowarsito No. 295 Klaten-Jateng Kode Pos 57431 Telp./ Fax : (0272) 321329.

2. Visi dan Misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1) Visi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai.

Maka Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah :

- a. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945,

- b. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila),
- c. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila),
- d. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
- e. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2) Misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7, 8, 9 dan 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu :

Pasal 7 Partai mempunyai tujuan umum:

- a. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan

- b. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pasal 8 Partai mempunyai tujuan khusus :

- a. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
- b. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
- c. Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;
- d. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan

- e. Menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Pasal 9 Partai mempunyai fungsi :

- a. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- b. Melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, Lembaga-Lembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;
- c. Membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
- e. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan
- f. Membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Pasal 10 Partai mempunyai tugas :

- a. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;
- c. Menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;
- e. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
- f. Mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
- g. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;
- h. Sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

C. Arti Lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. Penjelasan tanda gambar

Lambang PDI Perjuangan adalah berupa gambar banteng hitam bermoncong putih dengan latar merah di dalam lingkaran bergarsi hitam dan putih.

- a. Warna dasar merah melambangkan berani mengambil resiko dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk rakyat.
- b. Matah merah dengan pandangan tajam melambangkanselalu waspada terhadap ancaman dalam berjuang.
- c. Moncong putih melambangkan dapat di percaya dan berkomitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
- d. Lingkaran melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan yang terus-menerus tanpa terputus (<http://www.pdiperjuangan.or.id>).

D. Struktur Organisasi kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Klaten dan Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilu Dari Masa ke Masa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten

1. Struktur Organisasi Kepengurusan DPC PDI perjuangan Kabupaten Klaten dari masa ke masa

Dengan berjalannya waktu masa kepengurusan struktur organisasi Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Klaten berganti juga kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten dari periode ke periode. Jika dijelaskan kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten dengan struktur kepengurusan pada tahun 1999 terdapat tiga orang pengurus DPC PDI Perjuangan kabupaten Klaten yaitu selaku Ketua : Sumito Jati Purnomo, Sekretaris : Slamet Wiryo Atmojo, dan Bendahara : Subani. Pada tahun tersebut, kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten belum

berjalan sebagaimana mestinya karena hanya 1 tahun saja yang dimana tahun 1999 ini merupakan masa transisi dari era orde baru ke reformasi. Sehingga pada tahun 2000-2005 terjadi kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten dengan kepengurusan yang berbeda yaitu selaku Ketua : Haripramono, Sekretaris : Agus Suprianto, Bendahara : Tugiman Budi Darsono. Dan pada tahun 2006-2010 dengan siklus pergantian kepengurusan yang sudah berjalan normal maka kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten yaitu selaku Ketua : Harianto Wibowo, Sekretaris : Agus Rianto, Bendahara : Agus Pujiatmo. Namun di akhir tahun 2006 Harianto Wibowo meninggal dunia dan digantikan Hj. Sri Hartini, SE pada tahun 2007 untuk melanjutkan sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten (Sumber : DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten).

Selanjutnya sesuai dengan kurun waktu pada penelitian ini (2011-2015) dan mengacu pada surat ketetapan Nomor : 04.31-A/ TAP-DPC/ DPP/ III/ 2011 tentang penyempurnaan struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten. Maka telah ditentukan struktur kepengurusan DPC PDI Perjuangan di Kabupaten Klaten dengan Masa Bakti Tahun 2011-2015 sebagai berikut :

Tabel. V
Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten

NO	NAMA	JABATAN
1	Agus Arianto	Ketua
2	Ir. H. Tugiman	Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai
3	Eko Prasetyo, SE	Wakil Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga
4	Hj. Kadarwati, SH, MH	Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi dan Rekrutmen
5	Bambang Seno	Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi

	Birowa	
6	H. Heru Haryanto	Wakil Ketua Bidang Sumber Daya dan Dana
7	Didik Ahmadi	Wakil Ketua Bidang Pertanian, Perikanan, Industri dan Perdagangan
8	Hartanti, SH, M.si	Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja, Perempuan dan Anak
9	Drs. Harjanto	Wakil Ketua Bidang Kebudayaan dan Keagamaan, Pemuda dan Olahraga
10	Joko Purnomo, SH	Wakil Ketua Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup
11	Drs. Sriyanto	Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, Pertahanan dan Keamanan
12	H.Sunarno, SE, M.Hum	Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
13	Andi Purnomo, SH	Sekretaris
14	Supardiyo	Wakil Sekretaris Bidang Internal
15	Aris Widiarto, SE	Wakil Sekretaris Bidang Program
16	Sutarjo	Bendahara
17	Heni Widiyati	Wakil Bendahara Bidang Internal dan Program

Sumber : Lampiran Surat Ketetapan DPP PDI Perjuangan Nomor : 04.31-A/TAP-DPC/ DPP/ III/ 2011.

2. Hasil perolehan suara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten Dari Masa ke Masa Dalam Pemilu

Untuk dapat menjelaskan hasil perolehan suara dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten pada saat mengikuti pemilu di tingkat legislatif maupun eksekutif, maka akan di gambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel.VI

Perolehan suara/kursi PDI-P pada pemilu legislatif (DPRD Kab/Kota) dari beberapa periode di Kabupaten Klaten

No	Tahun	Perolehan suara	Jumlah kursi	Total kursi
1	2004	261,851(38,05%)	18	45
2	2009	189,200(29,00%)	15	50
3	2014	257,750(35,45%)	17	50

Sumber : www.kpu-klatenkab.go.id

Jika melihat hasil perolehan suara/kursi PDI-P pada pemilihan umum (Pemilu) legislatif (DPRD Kab/Kota) dari beberapa periode pada table diatas, dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Klaten merupakan daerah basis dari PDI Perjuangan. Dalam pemilu legislatif (DPRD Kab/Kota) di Kabupaten Klaten PDI-P pada tahun 2004 memperoleh suara 261,851(38,05%) yang mengantarkan kadernya mendapat kursi terbanyak yaitu 18 kursi dari 45 kursi yang ada. Sedangkan pada tahun 2009 PDI-P memperoleh suara 189,200(29,00%) yang mendapat 15 kursi dari 50 kursi yang ada, dan pada tahun 2014 PDI-P memperoleh suara 257,750(35,45%) yang mendapat 17 kursi dari 50 kursi. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian perolehan kursi yang diperoleh PDI-P tahun 2004 adalah yang tertinggi, tahun 2009 terjadi penurunan perolehan kursi, namun mengalami kenaikan perolehan 2 kursi pada tahun 2014.

Tabel. VII

Hasil Perolehan Suara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten sebagai partai pengusung pada pemilu eksekutif (pilihan bupati) dari beberapa periode di Kabupaten Klaten

No	Tahun	Perolehan Suara
1	2010	397,106
2	2015	321,593

Sumber : www.kpu-klatenkab.go.id

Pada tahun 2010 pilihan bupati yang diselenggarakan di Kabupaten Klaten sebagai Bupati terpilih H.Sunarna, SE, M.Hum dan wakilnya Hj. Sri Hartini, SE yang diusung bersama oleh Partai PDI-P, PKS dan Partai Demokrat mampu meraih 397,106 total suara sah dan merupakan bupati dan wakil yang mempunyai latar belakang sebagai kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan di

tahun 2015 pilihan bupati yang diselenggarakan dengan beberapa kandidat yang diusung oleh parpol salah satunya yaitu kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan mengusung pasangan bupati dan wakilnya Hj.Sri Hartini,SE dan Hj.Sri Mulyani mampu meraih 321,593 total suara sah yang berhasil mengulang kesuksesannya keluar sebagai Partai pemenang (www.kpu-klatenkab.go.id). Oleh karena itu tidak salah jika menyebut PDI-P menguasai struktur kekuasaan baik di tingkat legislatif maupun eksekutif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Klaten merupakan daerah yang pada setiap pemilihan umum diselenggarakan mulai dari tingkatan legislatif dan eksekutif PDI Perjuangan selalu memperoleh suara terbanyak dan memenangkan pemilihan umum. Walaupun perolehan suaranya dari masa ke masa selalu naik turun namun PDI Perjuangan tetap menjadi partai pemenang dan yang paling banyak disenangi oleh masyarakat Kabupaten Klaten.